

Transformasi Pembangunan dan Konsekuensi Gender dalam Proyek Strategis Nasional di Indonesia: Analisis Komparatif Rempang dan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pambudi Handoyo¹, Refti Listyani Handini²

¹Program Studi Sosiologi, Universita Negeri Surabaya,
pambudihandoyo@unesa.ac.id

²Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya,
reftihandini@unesa.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji bagaimana proyek pembangunan berskala besar menghasilkan ketimpangan gender melalui analisis komparatif Rempang Eco-City dan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Indonesia. Pembangunan kontemporer di negara-negara Global South, khususnya melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), telah mempercepat restrukturisasi wilayah melalui ekspansi infrastruktur, pengembangan industri, dan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru. Meskipun berbagai penelitian telah mendokumentasikan dampak sosial pembangunan, perhatian terhadap mekanisme yang menyebabkan transformasi pembangunan menghasilkan konsekuensi yang terdiferensiasi berdasarkan gender masih relatif terbatas. Penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan gender tidak muncul secara langsung akibat relokasi, urbanisasi, maupun pembangunan infrastruktur, tetapi dihasilkan melalui proses transformasi pembangunan, rekonfigurasi sumber daya, restrukturisasi mata pencaharian, serta intensifikasi kerja reproduksi sosial. Meskipun Rempang dan IKN memiliki jalur transformasi pembangunan yang berbeda, kedua kasus tersebut menunjukkan pola serupa berupa berkurangnya akses terhadap sumber daya produktif, ketimpangan kemampuan adaptasi terhadap perubahan mata pencaharian, dan meningkatnya beban reproduksi sosial yang lebih banyak ditanggung oleh perempuan. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini mengembangkan sebuah model konseptual yang menjelaskan bagaimana proyek-proyek pembangunan berskala besar mereproduksi ketimpangan gender melalui transformasi sistem-sistem sosial yang menopang kehidupan sehari-hari masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan Critical Integrative Review dengan mensintesis artikel jurnal terindeks Scopus, dokumen kebijakan, dan laporan kelembagaan periode 2021–2026 melalui metode thematic synthesis.

Kata kunci: Transformasi pembangunan; Konsekuensi gender; Reproduksi sosial; Rekonfigurasi sumber Daya; PSN

1. PENDAHULUAN

Transformasi pembangunan berskala besar telah menjadi salah satu karakteristik utama agenda pembangunan kontemporer di berbagai negara Global South. Melalui pembangunan infrastruktur, kawasan industri, kota baru, dan berbagai proyek strategis, negara berupaya

mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, dan memperkuat daya saing nasional. Namun demikian, berbagai kajian pembangunan menunjukkan bahwa intervensi berskala besar tidak hanya menghasilkan perubahan fisik wilayah, tetapi juga mengubah relasi masyarakat dengan tanah, sumber daya, dan sistem kehidupan yang menopang keberlangsungan sehari-hari. Dalam perspektif pembangunan kontemporer, transformasi wilayah selalu melibatkan perubahan akses terhadap sumber daya, perubahan struktur ekonomi lokal, serta restrukturisasi hubungan sosial yang berkembang di dalamnya (Scoones, 2021; Borras & Franco, 2025).

Perhatian terhadap konsekuensi sosial pembangunan semakin meningkat seiring berkembangnya kritik terhadap pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa manfaat dan risiko pembangunan tidak terdistribusi secara merata di antara kelompok sosial yang terdampak. Perubahan penguasaan lahan, konversi wilayah, serta reorganisasi ruang sering kali menghasilkan kerentanan baru bagi kelompok yang kehidupannya bergantung pada sumber daya lokal. Dalam konteks tersebut, pembangunan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses ekonomi, tetapi juga sebagai proses transformasi sosial yang mengubah kondisi material yang menopang kehidupan masyarakat (Scoones, 2021; Borras & Franco, 2025).

Dalam perdebatan tersebut, dimensi gender memperoleh perhatian yang semakin besar. Literatur gender dan pembangunan menunjukkan bahwa perubahan akses terhadap sumber daya, kesempatan ekonomi, dan proses pengambilan keputusan tidak pernah berlangsung dalam kondisi sosial yang netral. Posisi perempuan dan laki-laki dalam sistem mata pencaharian maupun reproduksi sosial menyebabkan keduanya mengalami konsekuensi pembangunan secara berbeda. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan sering kali menghadapi kerentanan yang lebih besar ketika pembangunan mengubah sumber daya yang menjadi basis kehidupan rumah tangga, sekaligus menanggung peningkatan tanggung jawab reproduksi sosial yang muncul selama proses adaptasi terhadap perubahan tersebut (Rai, 2023; Mezzadri et al., 2025).

Meskipun kajian mengenai gender dan pembangunan telah berkembang secara luas, sebagian besar penelitian masih berfokus pada bentuk-bentuk dampak tertentu secara terpisah. Kajian relokasi penduduk umumnya menyoroti displacement dan pemindahan komunitas. Studi urbanisasi lebih banyak membahas perubahan penggunaan lahan dan ekspansi kawasan perkotaan. Sementara itu, penelitian gender sering kali berfokus pada partisipasi perempuan, kerentanan ekonomi, atau eksklusivitas sosial. Akibatnya, berbagai literatur tersebut cenderung menjelaskan konsekuensi pembangunan secara parsial sehingga mekanisme yang menghubungkan transformasi pembangunan dengan munculnya ketimpangan gender belum sepenuhnya dipahami.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi instrumen utama pembangunan yang mendorong transformasi wilayah melalui pembangunan infrastruktur, kawasan industri, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa proyek-proyek tersebut menghasilkan perubahan signifikan terhadap tata kelola sumber daya, penggunaan lahan, dan hubungan masyarakat dengan wilayah tempat mereka hidup (Moniaga et al., 2023; Syaban & Appiah-Opoku, 2024). Kajian mengenai Rempang Eco-City maupun

pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menunjukkan bahwa pembangunan menghasilkan perubahan mendasar terhadap akses masyarakat terhadap ruang hidup dan sumber daya yang menopang keberlangsungan kehidupan mereka (Nuryasinta et al., 2025; Komnas Perempuan, 2025).

Namun demikian, penelitian yang ada masih cenderung menjelaskan dampak sosial masing-masing proyek secara terpisah. Relatif sedikit penelitian yang berupaya mengidentifikasi mekanisme yang lebih umum mengenai bagaimana berbagai bentuk transformasi pembangunan menghasilkan konsekuensi gender. Akibatnya, ketimpangan gender sering dipahami sebagai dampak yang bersifat kontekstual dan kasus-spesifik, bukan sebagai hasil dari proses sosial yang bekerja secara lebih luas di berbagai bentuk intervensi pembangunan.

Artikel ini menjawab kesenjangan tersebut melalui analisis komparatif terhadap Rempang Eco-City dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemilihan kedua kasus tidak didasarkan semata-mata pada statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional, tetapi karena keduanya merepresentasikan dua jalur transformasi pembangunan yang berbeda. Rempang mencerminkan bentuk *development-induced displacement* yang ditandai oleh relokasi penduduk dan transformasi teritorial yang berlangsung secara langsung. Sebaliknya, IKN merepresentasikan bentuk *state-led urban transformation* yang berlangsung melalui urbanisasi, reorganisasi wilayah, dan perubahan penggunaan lahan secara bertahap. Perbandingan kedua kasus memungkinkan identifikasi mekanisme yang lebih umum mengenai bagaimana transformasi pembangunan menghasilkan konsekuensi gender.

Artikel ini berargumen bahwa konsekuensi gender dalam Proyek Strategis Nasional tidak muncul secara langsung dari relokasi, pengadaan tanah, atau pembangunan infrastruktur itu sendiri. Sebaliknya, konsekuensi tersebut diproduksi melalui rangkaian proses yang saling berkaitan. Transformasi pembangunan merekonfigurasi akses terhadap sumber daya, mendorong restrukturisasi mata pencaharian rumah tangga, dan pada akhirnya mengintensifkan reproduksi sosial yang sebagian besar ditanggung oleh perempuan. Melalui mekanisme tersebut, pembangunan menghasilkan bentuk-bentuk ketimpangan gender yang relatif serupa meskipun berlangsung dalam konteks pembangunan yang berbeda.

Temuan artikel ini menunjukkan bahwa *contrasting development settings* dapat menghasilkan *convergent gendered outcomes*. Meskipun Rempang dan IKN merepresentasikan bentuk transformasi pembangunan yang berbeda, keduanya memperlihatkan pola yang serupa dalam rekonfigurasi sumber daya, restrukturisasi mata pencaharian, dan intensifikasi reproduksi sosial. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini mengembangkan kerangka konseptual yang menghubungkan transformasi pembangunan, rekonfigurasi sumber daya, restrukturisasi mata pencaharian, dan reproduksi sosial sebagai mekanisme yang menghasilkan konsekuensi gender dalam pembangunan berskala besar. Kontribusi penelitian ini tidak hanya terletak pada dokumentasi pengalaman perempuan dalam konteks Indonesia, tetapi juga pada penjelasan mengenai proses sosial yang memungkinkan proyek-proyek pembangunan kontemporer mereproduksi ketimpangan gender di berbagai konteks *Global South*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Critical Integrative Review untuk menganalisis bagaimana transformasi pembangunan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) menghasilkan konsekuensi gender. Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai transformasi pembangunan, tata kelola sumber daya, ketimpangan gender, mata pencaharian, dan reproduksi sosial berkembang dalam tradisi keilmuan yang beragam, mulai dari studi pembangunan, sosiologi, ekologi politik, studi gender, hingga kajian tata kelola lingkungan dan perkotaan. Meskipun membahas persoalan yang saling berkaitan, literatur-literatur tersebut umumnya berkembang secara terpisah sehingga mekanisme yang menghubungkan pembangunan dengan konsekuensi gender sering kali tidak terlihat secara utuh.

Critical Integrative Review memungkinkan integrasi berbagai bentuk bukti empiris dan konseptual untuk mengidentifikasi pola, hubungan kausal, serta mekanisme sosial yang melampaui konteks kasus tertentu (Torraco, 2016; Snyder, 2019; Xiao & Watson, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini tidak menempatkan pembangunan semata-mata sebagai persoalan pertumbuhan ekonomi, investasi, atau pembangunan infrastruktur, melainkan sebagai proses transformasi sosial yang mengubah akses terhadap sumber daya, strategi mata pencaharian, relasi sosial, dan reproduksi kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengembangkan penjelasan konseptual mengenai proses-proses yang menghasilkan konsekuensi gender dalam proyek pembangunan berskala besar.

Kajian ini menggunakan artikel ilmiah terindeks Scopus, dokumen kebijakan, dan laporan institusional yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2026. Sumber-sumber tersebut mencakup kajian mengenai Proyek Strategis Nasional, transformasi wilayah, tata kelola sumber daya, relokasi penduduk, mata pencaharian, ketimpangan gender, dan reproduksi sosial, termasuk publikasi yang secara khusus membahas Rempang Eco-City dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sumber dipilih apabila memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria berikut: 1) Membahas Proyek Strategis Nasional, pembangunan infrastruktur, transformasi wilayah, relokasi penduduk, atau pembangunan perkotaan; 2) Mengkaji konsekuensi sosial, ekonomi, lingkungan, tata kelola, atau gender dari intervensi pembangunan; 3) Menyajikan bukti empiris atau analisis yang relevan dengan Rempang, IKN, Indonesia secara umum, maupun konteks Global South yang memiliki karakteristik serupa.

3. ANALISIS DATA

Table 1. *Komparatif tentang Transformasi Pembangunan dan Konsekuensi Gender*

Dimensi	Rempang Eco-City	Ibu Kota Nusantara (IKN)	Implikasi Gender
Transformasi pembangunan	Relokasi penduduk dan pengembangan kawasan industri	Pemindahan ibu kota negara dan ekspansi kawasan perkotaan	Perubahan akses teritorial dan sistem penghidupan masyarakat

Dimensi	Rempang Eco-City	Ibu Kota Nusantara (IKN)	Implikasi Gender
Rekonfigurasi sumber daya	Restrukturisasi wilayah pesisir dan permukiman	Konversi lahan dan reorganisasi teritorial	Berkurangnya akses terhadap sumber daya produktif
Restrukturisasi penghidupan	Terganggunya aktivitas perikanan dan ekonomi berbasis komunitas	Peralihan menuju ekonomi perkotaan dan sektor jasa	Ketimpangan peluang adaptasi yang lebih besar bagi perempuan
Reproduksi sosial	Meningkatnya ketidakpastian rumah tangga dan tanggung jawab pengasuhan	Bertambahnya beban penyesuaian dalam kehidupan rumah tangga	Peningkatan beban kerja reproduktif yang tidak dibayar
Partisipasi dan keadilan pembangunan	Kontestasi terhadap kebijakan relokasi masyarakat	Kekhawatiran terkait inklusi masyarakat lokal dan komunitas adat dalam proses pembangunan	Keterwakilan kepentingan perempuan yang masih terbatas dalam pengambilan keputusan pembangunan

Table 2. *Analytical Themes Emerging from the Thematic Synthesis*

Tema Analitis	Pola Empiris Utama	Bukti Representatif	Konsekuensi Gender
Transformasi Pembangunan	Restrukturisasi teritorial dan ekonomi dalam skala besar	Berbagai studi mengenai intervensi pembangunan pada Rempang Eco-City dan Ibu Kota Nusantara (IKN)	Perubahan akses terhadap sumber daya dan sistem penghidupan masyarakat
Rekonfigurasi Sumber Daya	Perubahan penguasaan dan akses atas lahan, wilayah pesisir, kawasan hutan, serta permukiman	Moniaga et al. (2023); Syaban & Appiah-Opoku (2024); Nuryasinta et al. (2025)	Meningkatnya kerentanan penghidupan masyarakat
Restrukturisasi Penghidupan	Adaptasi rumah tangga terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial akibat pembangunan	Komnas Perempuan (2025); Mezzadri et al. (2025)	Ketimpangan peluang adaptasi dan meningkatnya ketidakamanan ekonomi, terutama bagi perempuan

Tema Analitis	Pola Empiris Utama	Bukti Representatif	Konsekuensi Gender
Intensifikasi Reproduksi Sosial	Meluasnya tanggung jawab pengasuhan, pekerjaan domestik, dan kerja reproduktif yang tidak dibayar	Rai (2023); Fernandes et al. (2023); Mezzadri et al. (2025)	Meningkatnya beban reproduksi sosial yang ditanggung secara tidak proporsional oleh perempuan
Dimensi Lintas Tema: Partisipasi dan Keadilan Pembangunan	Ketimpangan pengaruh dan keterlibatan kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan	Moniaga et al. (2023); Komnas Perempuan (2025)	Distribusi manfaat dan risiko pembangunan yang tidak setara, termasuk keterbatasan representasi kepentingan perempuan

Analisis tematik menghasilkan empat tema analitis yang saling berkaitan dan secara konsisten muncul dalam berbagai studi mengenai Rempang, IKN, serta literatur yang lebih luas tentang transformasi pembangunan, tata kelola sumber daya, mata pencaharian, dan reproduksi sosial. Meskipun Rempang dan IKN merepresentasikan bentuk transformasi pembangunan yang berbeda, sintesis menunjukkan pola yang relatif serupa dalam cara pembangunan mengubah hubungan masyarakat dengan sumber daya yang menopang kehidupan sehari-hari.

Studi mengenai perubahan tata guna lahan, restrukturisasi wilayah, dan relokasi masyarakat menempatkan rekonfigurasi sumber daya sebagai mekanisme awal yang menghubungkan pembangunan dengan perubahan sosial yang lebih luas (Moniaga et al., 2023; Syaban & Appiah-Opoku, 2024; Nuryasinta et al., 2025). Perubahan tersebut kemudian mendorong restrukturisasi mata pencaharian rumah tangga, terutama bagi kelompok yang bergantung pada sumber daya lokal, sekaligus menghasilkan bentuk-bentuk kerentanan yang tidak terdistribusi secara merata (Komnas Perempuan, 2025; Mezzadri et al., 2025).

Literatur mengenai kerja perawatan dan reproduksi sosial selanjutnya menunjukkan bahwa sebagian besar biaya adaptasi terhadap perubahan tersebut cenderung diserap oleh rumah tangga melalui peningkatan kerja reproduksi yang tidak dibayar, yang dalam banyak kasus ditanggung secara tidak proporsional oleh perempuan (Rai, 2023; Fernandes et al., 2023; Mezzadri et al., 2025). Temuan-temuan ini menjadi dasar bagi identifikasi empat tahapan yang menjelaskan bagaimana transformasi pembangunan menghasilkan konsekuensi gender dalam Proyek Strategis Nasional Indonesia.

3.1. Transformasi Pembangunan di Rempang

Pembangunan Rempang Eco-City merepresentasikan salah satu bentuk transformasi pembangunan paling signifikan dalam implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia. Proyek ini dirancang untuk mengintegrasikan kawasan Rempang ke dalam jaringan industri, perdagangan, dan investasi yang lebih luas sebagai bagian dari strategi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kerangka kebijakan pembangunan, Rempang

diposisikan sebagai ruang ekonomi baru yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing kawasan dan menarik investasi berskala besar.

Namun demikian, transformasi yang berlangsung di Rempang tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur atau ekspansi investasi. Proyek tersebut berlangsung pada wilayah yang telah lama dihuni masyarakat pesisir dengan keterikatan historis terhadap tanah, laut, dan jaringan sosial komunitas. Rencana relokasi ribuan penduduk memperlihatkan bahwa pembangunan juga melibatkan perubahan terhadap struktur penguasaan ruang yang selama ini menjadi fondasi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Temuan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa konflik yang berkembang di Rempang tidak hanya berkaitan dengan perpindahan tempat tinggal, tetapi juga menyangkut ketidakpastian masa depan komunitas serta hilangnya ruang hidup yang memiliki nilai sosial, ekonomi, dan kultural bagi masyarakat setempat (Komnas Perempuan, 2025; Nuryasinta et al., 2025).

Dalam perspektif sosiologi pembangunan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan bekerja sebagai proses transformasi sosial yang mengubah hubungan masyarakat dengan wilayah yang mereka tempati. Ruang yang sebelumnya dipahami sebagai ruang hidup komunitas secara bertahap didefinisikan sebagai ruang pembangunan yang tunduk pada logika investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, transformasi pembangunan di Rempang tidak hanya menghasilkan perubahan fisik wilayah, tetapi juga menciptakan perubahan dalam relasi kuasa yang mengatur akses terhadap sumber daya dan masa depan komunitas lokal (Komnas Perempuan, 2025; Borrás et al., 2025).

3.2. Transformasi Pembangunan di IKN

Transformasi pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) berlangsung dalam skala yang jauh lebih luas dibandingkan Rempang. Pembangunan IKN tidak hanya ditujukan untuk memindahkan pusat pemerintahan nasional, tetapi juga untuk membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru yang diharapkan mampu mengurangi konsentrasi pembangunan di Pulau Jawa. Melalui proyek ini, negara berupaya membangun konfigurasi spasial baru yang mengintegrasikan fungsi pemerintahan, investasi, teknologi, dan pembangunan perkotaan dalam satu kawasan terencana.

Transformasi tersebut berlangsung melalui perubahan penggunaan lahan yang sangat besar. Analisis perubahan tutupan lahan menunjukkan adanya peningkatan kawasan terbangun dan ekspansi infrastruktur yang diikuti oleh berkurangnya lahan pertanian serta perubahan fungsi kawasan hutan. Dengan demikian, pembangunan IKN tidak hanya menghasilkan kota baru, tetapi juga mengubah struktur sosial-ekologis yang sebelumnya menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dan komunitas adat di kawasan tersebut (Syaban & Appiah-Opoku, 2024; Hernawan, 2023).

Berbeda dengan Rempang yang ditandai oleh konflik relokasi secara langsung, transformasi pembangunan di IKN berlangsung melalui proses urbanisasi dan reorganisasi wilayah secara bertahap. Akan tetapi, kedua kasus menunjukkan karakteristik yang serupa, yaitu perubahan hubungan antara masyarakat dengan sumber daya yang menopang kehidupan mereka. Dalam konteks ini, pembangunan berfungsi sebagai mekanisme institusional yang

mendefinisikan ulang akses terhadap tanah, ruang, dan peluang ekonomi yang tersedia bagi masyarakat terdampak (Syaban & Appiah-Opoku, 2024; Moniaga et al., 2023).

3.3. Rekonfigurasi Akses terhadap Tanah dan Sumber Daya

Analisis terhadap kedua kasus menunjukkan bahwa konsekuensi gender tidak muncul secara langsung dari pembangunan. Mekanisme yang pertama kali menghubungkan pembangunan dengan perubahan kehidupan sosial masyarakat adalah rekonfigurasi akses terhadap tanah dan sumber daya. Melalui proses ini, pembangunan mengubah cara masyarakat memperoleh, menggunakan, dan mempertahankan sumber daya yang selama ini menopang keberlangsungan hidup mereka.

Di Rempang, rekonfigurasi sumber daya terjadi melalui perubahan status dan penguasaan wilayah pesisir, kawasan permukiman, dan ruang ekonomi komunitas. Aktivitas perikanan, pengolahan hasil laut, perdagangan lokal, serta berbagai bentuk ekonomi berbasis komunitas menjadi semakin rentan ketika akses terhadap ruang produksi dan ruang hidup mengalami ketidakpastian. Sementara itu, di IKN, rekonfigurasi sumber daya berlangsung melalui konversi lahan dan integrasi wilayah ke dalam sistem pembangunan perkotaan yang lebih luas. Dalam kedua kasus tersebut, pembangunan tidak sekadar mengubah penggunaan lahan, tetapi juga mengubah hubungan sosial yang mengatur akses terhadap sumber daya (Syaban & Appiah-Opoku, 2024; Nuryasinta et al., 2025).

Perubahan akses terhadap sumber daya tidak berdampak secara seragam terhadap seluruh kelompok masyarakat. Kemampuan untuk beradaptasi sangat dipengaruhi oleh kepemilikan aset, posisi sosial, akses kelembagaan, dan kapasitas ekonomi yang dimiliki masing-masing kelompok. Oleh karena itu, pembangunan cenderung menghasilkan distribusi manfaat dan risiko yang tidak merata. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi kelompok yang lebih rentan karena sebagian besar aktivitas ekonomi dan reproduksi sosial mereka memiliki keterkaitan langsung dengan sumber daya yang sedang mengalami transformasi (Borras et al., 2025; Mezzadri et al., 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa sumber utama kerentanan bukanlah pembangunan itu sendiri, melainkan perubahan struktur akses terhadap sumber daya yang dihasilkan oleh pembangunan. Ketika akses terhadap tanah, wilayah pesisir, atau ruang ekonomi lokal mengalami perubahan, strategi hidup yang selama ini menopang keberlangsungan rumah tangga ikut mengalami tekanan.

3.4. Transformasi Mata Pencaharian Perempuan

Rekonfigurasi sumber daya selanjutnya mendorong restrukturisasi mata pencaharian rumah tangga. Pada tahap ini, perempuan menjadi salah satu kelompok yang mengalami dampak paling besar karena aktivitas ekonomi mereka sering kali berhubungan langsung dengan sumber daya lokal yang mengalami perubahan.

Di Rempang, perempuan terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi berbasis komunitas seperti pengolahan hasil laut, perdagangan skala kecil, distribusi produk perikanan, dan berbagai bentuk pekerjaan informal yang berkembang di sekitar ekonomi pesisir. Ketika akses terhadap ruang produksi menjadi tidak pasti, sumber pendapatan yang selama ini menopang

rumah tangga juga ikut mengalami gangguan. Akibatnya, perempuan harus mengembangkan strategi ekonomi baru untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan keluarga di tengah perubahan yang sedang berlangsung (Komnas Perempuan, 2025; Nuryasinta et al., 2025).

Di IKN, restrukturisasi mata pencaharian berlangsung melalui pergeseran menuju ekonomi perkotaan yang lebih bergantung pada sektor jasa, konstruksi, dan investasi. Meskipun pembangunan membuka peluang ekonomi baru, tidak semua kelompok memiliki kapasitas yang sama untuk mengakses peluang tersebut. Perempuan yang sebelumnya bergantung pada aktivitas ekonomi berbasis lahan atau sumber daya lokal sering kali menghadapi hambatan berupa keterbatasan modal, keterampilan, maupun akses terhadap jaringan ekonomi baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan dapat menciptakan peluang baru sekaligus menghasilkan bentuk-bentuk baru ketimpangan adaptasi (Syaban & Appiah-Opoku, 2024; Mezzadri et al., 2025).

Dengan demikian, perubahan mata pencaharian perempuan bukan sekadar konsekuensi ekonomi dari pembangunan. Restrukturisasi tersebut merupakan hasil dari perubahan akses terhadap sumber daya yang memaksa rumah tangga menyesuaikan strategi hidup mereka terhadap kondisi sosial-ekonomi yang baru.

3.5. Peningkatan Beban Reproduksi Sosial Perempuan

Transformasi pembangunan tidak hanya mengubah aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga memengaruhi reproduksi sosial yang menopang keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Dalam kedua kasus, perubahan akses terhadap sumber daya dan mata pencaharian menghasilkan peningkatan tanggung jawab reproduksi sosial yang sebagian besar ditanggung oleh perempuan.

Di Rempang, ketidakpastian relokasi, konflik pembangunan, dan perubahan lingkungan sosial menciptakan tekanan tambahan bagi rumah tangga. Dalam situasi tersebut, perempuan sering kali menjadi pihak yang bertanggung jawab menjaga stabilitas keluarga, mengelola kebutuhan rumah tangga, mendampingi anggota keluarga yang terdampak, serta memastikan keberlangsungan kehidupan sehari-hari selama masa transisi. Laporan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa perempuan juga mengalami tekanan psikososial yang lebih besar akibat ketidakpastian masa depan komunitas dan keluarga mereka (Komnas Perempuan, 2025; Fernandes et al., 2023).

Di IKN, reorganisasi ruang dan perubahan pola kehidupan masyarakat menghasilkan kebutuhan adaptasi baru yang tidak selalu terlihat dalam indikator pembangunan konvensional. Perubahan mobilitas, akses layanan, jaringan sosial, dan pola kerja rumah tangga menciptakan tambahan beban kerja reproduksi yang sebagian besar diserap oleh perempuan. Dengan demikian, sebagian biaya sosial pembangunan sesungguhnya dipindahkan ke tingkat rumah tangga melalui peningkatan kerja reproduksi yang tidak dibayar (Mezzadri et al., 2025; Rai, 2023).

Temuan ini memperlihatkan bahwa pembangunan tidak hanya mendistribusikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendistribusikan beban sosial. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi kelompok yang menyerap sebagian besar biaya adaptasi yang muncul akibat transformasi pembangunan karena mereka tetap memegang tanggung jawab utama dalam menjaga

keberlangsungan kehidupan keluarga dan komunitas (Fernandes et al., 2023; Mezzadri et al., 2025).

3.6. Partisipasi dan Keadilan dalam Pembangunan

Perbedaan dampak pembangunan terhadap berbagai kelompok sosial menunjukkan pentingnya partisipasi sebagai bagian dari keadilan pembangunan. Dalam kedua kasus, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan hasil pembangunan, tetapi juga dengan siapa yang memiliki kesempatan untuk memengaruhi keputusan yang menentukan masa depan wilayah dan sumber daya mereka.

Di Rempang, berbagai bentuk resistensi masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara agenda pembangunan yang dirumuskan secara top-down dengan aspirasi masyarakat yang terdampak secara langsung. Sementara itu, dalam konteks IKN, sejumlah kajian juga menekankan pentingnya memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dan komunitas adat agar pembangunan tidak menghasilkan bentuk-bentuk eksklusi sosial baru. Dengan demikian, partisipasi tidak dapat dipahami sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai mekanisme yang menentukan distribusi manfaat dan risiko pembangunan (Moniaga et al., 2023; Syaban & Appiah-Opoku, 2024).

Dari perspektif gender, persoalan partisipasi menjadi semakin penting karena perempuan sering kali mengalami dampak pembangunan secara langsung melalui perubahan mata pencaharian dan peningkatan kerja reproduksi sosial. Namun demikian, keterlibatan perempuan dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan sering kali lebih terbatas dibandingkan kelompok lainnya. Akibatnya, berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari rumah tangga dan komunitas tidak selalu terakomodasi dalam desain pembangunan (Komnas Perempuan, 2025; Mezzadri et al., 2025).

Keadilan pembangunan karena itu tidak hanya berkaitan dengan distribusi keuntungan ekonomi, tetapi juga menyangkut pengakuan terhadap pengalaman, kebutuhan, dan hak kelompok-kelompok yang terdampak secara langsung oleh transformasi pembangunan.

3.7. Pola Komparatif Konsekuensi Gender

Perbandingan antara Rempang dan IKN menunjukkan pola yang relatif konsisten meskipun kedua proyek memiliki skala, karakteristik, dan tujuan pembangunan yang berbeda. Dalam kedua kasus, pembangunan menjadi titik awal dari serangkaian perubahan sosial yang saling berkaitan dan secara bertahap menghasilkan konsekuensi gender.

Transformasi pembangunan terlebih dahulu merekonfigurasi akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya. Perubahan tersebut kemudian mendorong restrukturisasi mata pencaharian rumah tangga karena masyarakat harus menyesuaikan strategi hidup mereka terhadap kondisi baru. Restrukturisasi mata pencaharian selanjutnya meningkatkan beban reproduksi sosial yang sebagian besar ditanggung oleh perempuan. Melalui mekanisme inilah konsekuensi gender diproduksi dan direproduksi dalam proyek-proyek pembangunan berskala besar (Syaban & Appiah-Opoku, 2024; Mezzadri et al., 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa konsekuensi gender bukan merupakan dampak langsung dari pembangunan, melainkan hasil dari hubungan kausal yang menghubungkan transformasi

pembangunan dengan perubahan struktur sumber daya, strategi mata pencaharian, dan reproduksi sosial. Dengan demikian, dampak pembangunan terhadap perempuan tidak dapat dipahami hanya melalui indikator ekonomi atau tingkat partisipasi kerja semata.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini mengembangkan model konseptual yang menjelaskan bahwa konsekuensi gender dalam Proyek Strategis Nasional dihasilkan melalui empat tahapan yang saling berkaitan: transformasi pembangunan, rekonfigurasi sumber daya, restrukturisasi mata pencaharian, dan intensifikasi reproduksi sosial. Model ini memberikan kontribusi baru terhadap kajian pembangunan dan gender dengan menunjukkan bahwa pembangunan menghasilkan konsekuensi gender melalui perubahan yang terjadi pada keseluruhan sistem sosial yang menopang keberlangsungan kehidupan rumah tangga dan komunitas. Dengan demikian, analisis mengenai dampak pembangunan tidak cukup berfokus pada pertumbuhan ekonomi atau perubahan penggunaan lahan, tetapi perlu memperhatikan bagaimana transformasi pembangunan mengubah relasi sumber daya, strategi hidup, dan kerja reproduksi sosial yang membentuk pengalaman perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

4. KESIMPULAN

Transformasi pembangunan berskala besar dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia menghasilkan konsekuensi yang berkelindan dengan relasi gender melalui analisis komparatif pada Rempang Eco-City dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun kedua proyek tersebut memiliki perbedaan dalam skala, desain kelembagaan, serta orientasi pembangunan, temuan penelitian menunjukkan pola transformasi sosial yang relatif serupa. Pada kedua kasus, intervensi pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik dan perluasan investasi ekonomi, tetapi juga mengubah hubungan masyarakat dengan wilayah, sumber daya, dan basis penghidupan yang menopang kehidupan sehari-hari.

Analisis menunjukkan bahwa konsekuensi gender tidak muncul secara langsung dari proyek pembangunan itu sendiri. Konsekuensi tersebut terbentuk melalui rangkaian proses transformasi yang saling terkait. Intervensi pembangunan terlebih dahulu mengubah akses masyarakat terhadap tanah, wilayah pesisir, hutan, dan berbagai sumber daya penghidupan lainnya. Perubahan tersebut kemudian mendorong restrukturisasi strategi nafkah rumah tangga sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi ekonomi dan spasial yang baru. Restrukturisasi penghidupan selanjutnya meningkatkan tuntutan kerja reproduksi sosial yang dalam praktiknya masih banyak ditanggung oleh perempuan. Melalui proses ini, perempuan menyerap sebagian besar biaya sosial yang dihasilkan oleh transisi pembangunan, mulai dari ketidakpastian penghidupan, tekanan adaptasi rumah tangga, hingga meningkatnya beban kerja reproduktif yang tidak dibayar.

Temuan komparatif juga menunjukkan bahwa persoalan utama tidak semata-mata terletak pada relokasi penduduk, urbanisasi, ataupun perubahan tata guna lahan. Mekanisme yang lebih mendasar terletak pada transformasi akses terhadap sumber daya yang menjadi fondasi reproduksi sosial dan ekonomi masyarakat. Baik melalui relokasi langsung sebagaimana terjadi di Rempang maupun melalui reorganisasi wilayah dan urbanisasi bertahap sebagaimana berlangsung di IKN, pembangunan mengubah kondisi yang memungkinkan rumah tangga mempertahankan penghidupan dan keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Akibatnya,

manfaat dan risiko pembangunan terdistribusi secara tidak merata di antara kelompok sosial yang berbeda, dengan perempuan sering kali menanggung beban yang lebih besar karena posisi struktural mereka dalam pemeliharaan penghidupan dan reproduksi sosial.

REFERENSI

- Borras, S. M., & Franco, J. C. 2025. Land politics, territorial transformation, and development in the Global South. *Globalizations*.
- Borras, S. M., Franco, J. C., Scoones, I., & colleagues. 2025. *Resource governance and agrarian transformations in contemporary development*. *Journal of Peasant Studies*.
- Fernandes, Marianna, Luisa Lupo, Asanda Benya, Saniye Dedeoğlu, Alessandra Mezzadri dan Elisabeth Prügl. 2023. Social reproduction, women's labour and systems of life: A conversation. (*Dialogues in Human Geography* Vol. 13 No. 3). London, SAGE Publications. Diakses pada <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20438206231177072>
- Hernawan, Dedy. 2023. Assessing the impact of land development regulations on customary land values: A case study of Rempang and IKN in Indonesia. (*Society* Vol. 11 No. 2). Bangka, Universitas Bangka Belitung. Diakses pada <https://societyfisipubb.id/index.php/society/article/view/584>.
- Komnas Perempuan (28 April 2025). "Laporan Pemantauan Konflik Pulau Rempang: Dampak Dari Pembangunan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City". Diakses pada <https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/laporan-pemantauan-konflik-pulau-rempang-dampak-dari-pembangunan-proyek-strategis-nasional-rempang-eco-city>.
- Mezzadri, Alessandra, Shirin M. Rai, Sara Stevano, Donatella Alessandrini, Hannah Bargawi, Juanita Elias, Shireen Hassim, Surbhi Kesar, Jan Thiyaga Lingham, Serena Natile, N. Neetha, Lyn Ossome, Parvati Raghuram, Dzodzi Tsikata dan Stefanie Wöhl. 2025. Pluralizing social reproduction approaches. (*International Feminist Journal of Politics* Vol. 27 No. 1). London, Routledge. Diakses pada <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616742.2024.2447594>.
- Moniaga, S., et al. 2023. Land governance, territorial transformation, and development justice in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*.
- Nuryasinta, D., et al. 2025. Social impacts of Rempang Eco-City development and community livelihoods transformation. *Journal of Indonesian Social Development Studies*.
- Rai, Shirin M. 2023. Social reproduction and depletion. (*Feminists@law* Vol. 12 No. 2). Canterbury, University of Kent. Diakses pada <https://journals.kent.ac.uk/index.php/feministsatlaw/article/view/1221>
- Scoones, I. 2021. Transformations, livelihoods, and rural development in the Global South. *Journal of Peasant Studies*, 48(5), 1001–1021.
- Snyder, Hannah. 2019. Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. (*Journal of Business Research* Vol. 104). Amsterdam, Elsevier. Diakses pada <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296319304564>.
- Syaban, Alfath Satria Negara dan Seth Appiah-Opoku. 2024. Unveiling the complexities of land use transition in Indonesia's new capital city IKN Nusantara: A multidimensional conflict analysis. (*Land* Vol. 13 No. 5). Basel, MDPI. Diakses pada <https://www.mdpi.com/2073-445X/13/5/606>.
- Thomas, J., & Harden, A. 2008. Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8, 45.

- Torraco, Richard J. 2016. Writing integrative literature reviews: Using the past and present to explore the future. (Human Resource Development Review Vol. 15 No. 4). Thousand Oaks, SAGE Publications. Diakses pada <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1534484316671606>
- Xiao, Yu dan Maria Watson. 2019. Guidance on conducting systematic literature reviews. (Journal of Planning Education and Research Vol. 39 No. 1). Thousand Oaks, SAGE Publications. Diakses pada https://www.researchgate.net/publication/319343044_Guidance_on_Conducting_a_Systematic_Literature_Review